

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Program Bantuan Sosial Di Dinas Kabupaten Jember

Khamdan Rifa'i¹, Ernawati², Desi Fitri Amalia³, Rahmawati Sumarto Putri⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ khamdanrifai@uinkhas.ac.id, ² ernawati.eksyar05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Jember serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Program bantuan sosial merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi beban ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan pegawai atau pelaksana program, pendamping, penerima manfaat, serta dokumen dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial dilakukan melalui proses pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, pengawasan, serta evaluasi. Program ini memberikan manfaat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meskipun masih terdapat kendala dalam ketepatan dan validitas data penerima. Ditinjau dari ekonomi syariah, pelaksanaan bantuan sosial mencerminkan prinsip keadilan, amanah, ta'awun, dan maslahah. Oleh karena itu, pelaksanaan program perlu dilakukan secara transparan, tepat sasaran, bertanggung jawab, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Bantuan Sosial, Dinas Sosial, Keadilan, Maslahah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang masih membutuhkan perhatian pemerintah secara berkelanjutan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta kesempatan meningkatkan taraf hidup (UU No.11, 2009). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, upaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi berkaitan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ekonomi syariah menempatkan masalah sebagai salah satu tujuan utama dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, prinsip keadilan, amanah, ta'awun, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam memastikan bahwa sumber daya dan bantuan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, program bantuan sosial dapat menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai ekonomi syariah apabila dilaksanakan secara adil, amanah, transparan, dan tepat sasaran.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada tingkat daerah, Dinas Sosial Kabupaten Jember berperan dalam penyelenggaraan berbagai program sosial, termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Pelaksanaan program tersebut mencakup proses pendataan, verifikasi penerima, penyaluran bantuan, serta pengawasan dan evaluasi.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa program bantuan sosial masih relevan untuk dikaji. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 216.760 orang atau 8,67 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 224.770 orang atau 9,01 persen (BPS Kab. Jember, 2025). Meskipun mengalami penurunan, jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.

Permasalahan dalam pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bantuan, tetapi juga ketepatan sasaran, validitas data penerima, keadilan distribusi, transparansi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Kondisi

tersebut penting dikaji dari perspektif ekonomi syariah untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, ta'awun, dan masalah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Jember serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan bantuan sosial sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan ketepatan sasaran, keadilan, transparansi, dan manfaat program bagi masyarakat.

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan program bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Jember serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai lokasi kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan periode PPL.

Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pelayanan dan pelaksanaan program bantuan sosial. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pegawai atau pelaksana program, pendamping, serta penerima manfaat apabila memungkinkan. Wawancara difokuskan pada mekanisme pendataan, verifikasi dan penetapan penerima, penyaluran bantuan, pengawasan, kendala pelaksanaan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penerima manfaat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen program, laporan kegiatan, foto kegiatan, peraturan, dan sumber pendukung lainnya.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen Dinas Sosial Kabupaten Jember, data BPS, peraturan pemerintah, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai pelaksanaan bantuan sosial berdasarkan prinsip keadilan, amanah, ta'awun, dan masalah dalam ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Kabupaten Jember

Bantuan sosial tidak hanya diberikan dalam bentuk barang saja. Berdasarkan pengamatan selama PPL, pelaksanaan program terdiri dari beberapa proses yang saling terkait, seperti mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan, melakukan pendataan, verifikasi, menentukan penerima, mengurus dokumen, menyalurkan bantuan, mencatat data, mengarsipkan, berkomunikasi, melakukan pengawasan, dan evaluasi. Dinas Sosial membantu dalam pengumpulan data, memastikan data tersebut benar, memberikan bantuan, berkerja sama dengan pihak lain, mengawasi, serta mengevaluasi program sesuai dengan wewenang daerah dan mekanisme program yang berlaku (Juliansyah, Imanda, & Is, 2025; Lailiyah, Wulandari, & Anam, 2025).

Administrasi memiliki posisi penting dalam mekanisme tersebut. Membuat BAST, mencatat buku besar, memberi nomor surat, menyimpan arsip, dan menginput penerima adalah bagian dari usaha menjaga keadaan tetap rapi dalam proses bantuan. Data penerima diatur sesuai dengan jenis bantuan, lokasi tempat tinggal, dan tanggal pengiriman agar informasi mengenai bantuan tersebut dapat dicatat dengan rapi.

Temuan ini selaras dengan penelitian Herlambang dan Wicaksono (2025) yang menunjukkan bahwa bantuan sosial di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember membantu kelompok rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih menghadapi masalah terkait ketidakakuratan data penerima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketelitian dalam beradministration tidak terlepas dari ketepatan tujuan bantuan.

Pelayanan sosial juga membutuhkan komunikasi dan koordinasi. Penerima manfaat memiliki latar belakang, kondisi ekonomi, usia, masalah, dan kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu, petugas harus berbicara dengan sopan, sabar, tidak menyalahkan, dan menjaga rahasia informasi yang diterima. Pelayanan rehabilitasi sosial tidak bisa dilakukan oleh satu pihak sendiri karena beberapa kasus memerlukan bantuan dari fasilitas kesehatan, pemerintah desa, kepolisian, keluarga penerima manfaat, serta lembaga sosial lainnya.

Silviana dan Chilmy (2024) menjelaskan bahwa pendamping sosial berperan sebagai fasilitator, pengajar, dan pendorong. Salsabila, Suharsono, dan Ngoro (2024) juga menyoroti peran seorang motivator, komunikator, dan fasilitator dalam layanan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Jember. Temuan itu menunjukkan bahwa layanan sosial tidak cukup hanya memberi bantuan barang, tetapi juga membutuhkan bantuan, komunikasi, dan kerja sama antar pihak.



Gambar 1. Distribusi bansos untuk lansia disabilitas

Bantuan Sosial dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Tujuan utama bantuan sosial adalah membantu orang yang sedang kesulitan agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Jember, bantuan seperti sembako, pakaian, kursi roda, kruk, kasur, pakaian anak, dan susu formula menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan secara langsung. Bantuan tersebut bisa membantu orang-orang yang memiliki masalah ekonomi atau kondisi sosial yang sulit. Herlambang dan Wicaksono (2025) menyatakan bahwa bantuan sosial memberikan manfaat positif bagi kelompok yang rentan, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pokok mereka.

Pemenuhan kebutuhan pokok sangat berkaitan dengan konsep masalah dalam ekonomi syariah. Masalah berarti kebaikan yang bertujuan untuk memberi manfaat dan menghindari kerugian bagi manusia. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga meliputi hal-hal seperti kehidupan sosial, nilai moral, dan aspek spiritual. Ini berkaitan dengan tujuan syariah, terutama untuk melindungi nyawa dan harta (Nirfalia, 2022).

Bantuan untuk kebutuhan makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya bisa dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan manusia. Bantuan ekonomi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan harta orang. Oleh karena itu, program bantuan sosial bisa dianggap bermanfaat asal benar-benar diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan dijalankan dengan pengelolaan yang baik.

Akses ke bantuan juga tergantung pada seberapa tepat dalam mengenali dan mencatat masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang miskin atau berisiko tidak selalu bisa mendapatkan bantuan hanya karena situasi mereka, khususnya jika belum terdaftar dalam data penerima bantuan. Perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial, cara mengelola data penduduk, serta proses pembaruan informasi bisa memengaruhi bagaimana masyarakat mendapatkan layanan tersebut.

Prinsip Al-‘Adl, Ta’awun, Amanah, dan Kejujuran

Prinsip al-‘adl atau keadilan adalah bagian penting dalam memberikan bantuan sosial. Keadilan berarti bantuan diberikan berdasarkan kondisi dan kriteria yang sudah ditentukan, bukan karena hubungan pribadi, kepentingan tertentu, atau faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perlakuan yang tidak adil. Bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus sesuai dengan prinsip syariah karena sumber daya milik publik digunakan dengan tepat.

Jika bantuan diberikan kepada orang yang tidak layak, sedangkan masyarakat yang lebih membutuhkan tidak mendapat bantuan, maka tujuan memberikan manfaat tersebut belum tercapai. Oleh karena itu, proses verifikasi dan pembaruan data sangat penting agar bantuan sosial dapat diberikan secara adil dan tepat kepada orang yang memang membutuhkan. Abiyani dan Setyowati (2025) menyatakan bahwa keberhasilan program bantuan sosial juga bergantung pada cara distribusinya yang adil.

Prinsip ta’awun artinya sikap saling bantu mengambil langkah baik. Pemerintah melalui program bantuan sosial pada dasarnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Bantuan sosial bisa menunjukkan semangat tolong menolong, keadilan, dan kepentingan umum jika diberikan secara adil, tepat sasaran, serta mampu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.

Selain itu, nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab tetap relevan meskipun UPT Rehabilitasi Sosial merupakan lembaga pelayanan publik dan bukan perusahaan yang mencari keuntungan. Amanah terlihat dari cara pegawai dan mahasiswa mengelola data serta melayani masyarakat dengan tanggung jawab. Kejujuran terlihat ketika memberi informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan keadilan dicapai dengan memberikan pelayanan tanpa membedakan antara siapa

pun.

Pelaksanaan tugas administrasi, mencatat BAST, memberi nomor pada surat, mengarsipkan, serta memasukkan data merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan dalam mengelola bantuan. Dalam pandangan ekonomi syariah, sumber daya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat harus dikelola dengan tanggung jawab, sehingga manfaatnya bisa sampai kepada orang yang berhak.

Ketepatan Sasaran dan Prinsip Keadilan

Ketepatan sasaran merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan bantuan sosial. Bantuan perlu diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai bantuan sosial di Kabupaten Jember, masih ditemukan kendala dalam validasi data penerima. Kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya masyarakat yang membutuhkan tetapi belum memperoleh bantuan. (Susi Saidah, 2026)

Berdasarkan hasil pengamatan selama PPL, proses administrasi dan pendataan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Data penerima perlu diperiksa dan dilengkapi agar bantuan dapat disalurkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Proses tersebut menunjukkan bahwa ketepatan data memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan program bantuan sosial.

Dalam ekonomi syariah, ketepatan sasaran berkaitan erat dengan prinsip keadilan. Keadilan berarti memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kebutuhan pihak yang berhak menerimanya. Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi manfaat program dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, proses pendataan, verifikasi, dan validasi perlu dilakukan secara cermat, objektif, dan berkelanjutan.

Bantuan Sosial dan Kemandirian Ekonomi

Bantuan sosial sebenarnya tidak hanya berupa pemberian bantuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang singkat. Jika bantuan hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sementara tanpa ada usaha meningkatkan kemampuan ekonomi penerima, bisa timbul ketergantungan terhadap bantuan itu.

Penelitian Herlambang dan Wicaksono tahun 2025 menunjukkan bahwa bantuan sosial di Kelurahan Slawu masih bersifat sementara dan belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat yang menerima bantuan secara penuh. Silviana dan Chilmy (2024) juga menemukan bahwa masyarakat sangat bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi cara bantuan tersebut digunakan tidak selalu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program tersebut.

Dari segi ekonomi syariah, pemberdayaan penting karena tujuan kesejahteraan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sementara, tetapi agar masyarakat bisa terus memenuhi kebutuhannya setiap hari. Bantuan dana untuk usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan bisa membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka, sehingga secara perlahan bisa mengurangi ketergantungan pada bantuan yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu, bantuan sosial harus disertai dengan program peningkatan kualitas masyarakat, pelatihan kemampuan, pendampingan bisnis, akses ke dana serta bantuan ekonomi. Penelitian dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa bantuan modal usaha dan pembiayaan dari BMT dapat membantu memperkuat lembaga ekonomi lokal, sehingga berdampak positif pada peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (Nirfalia, 2022).

Program bantuan sosial yang diberikan oleh UPT Rehabilitasi Sosial bisa dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, dan juga harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan orang-orang yang menerima manfaatnya. Bantuan yang diberikan kepada kelompok rentan masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan upaya yang mendorong kemandirian.

KESIMPULAN

Program bantuan sosial tidak hanya memberikan bantuan kepada warga, tetapi juga melibatkan beberapa proses seperti mengumpulkan data, memeriksa informasi, mengurus dokumen, menyimpan berkas-berkas, berkoordinasi dengan pihak lain, serta menyalurkan bantuan tepat kepada yang layak. Selama PPL, mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam membuat BAST, mencatat dan menyimpan dokumen, menginput data penerima, serta menyalurkan bantuan sosial berupa sembako, kursi roda, pakaian, kasur, dan bantuan lainnya.

Dilihat dari perspektif ekonomi syariah, pelaksanaan program bantuan sosial harus sesuai dengan prinsip masalah, al-'adl, ta'awun, amanah, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Bantuan sosial membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memberikan dukungan agar tekanan ekonomi bagi kelompok yang membutuhkan dapat berkurang. Prinsip keadilan sangat penting agar bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang sudah ditentukan, tanpa membedakan penerima berdasarkan hubungan pribadi atau kepentingan tertentu.

Namun, pemberian bantuan sosial masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal keakuratan dan pembaruan data penerima, keterbatasan jumlah sumber daya, serta koordinasi antar instansi. Selain mendorong kebutuhan dalam waktu singkat,

bantuan sosial juga harus diarahkan untuk meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi penerima agar tidak membuat mereka bergantung pada bantuan terus-menerus.

Bagi Dinas Sosial Kabupaten Jember, melakukan pembaruan dan memverifikasi data penerima bantuan sosial secara rutin penting dilakukan agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mahasiswa yang menjalani Program Praktik Lapangan (PPL) perlu meningkatkan disiplin, ketelitian, kemampuan berkomunikasi, rasa tanggung jawab, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta kemampuan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama masa kuliah.

Rekomendasi

Dinas Sosial Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendataan, verifikasi, dan validasi penerima bantuan secara berkala agar bantuan lebih tepat sasaran. Pengawasan dan transparansi dalam proses penyaluran juga perlu diperkuat untuk menjaga amanah dan keadilan dalam distribusi bantuan. Selain itu, program bantuan sosial sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga disertai upaya pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Jember, terutama UPT Rehabilitasi Sosial, yang sudah memberikan kesempatan, petunjuk, serta pengalaman selama pelaksanaan PPL. Terima kasih juga diucapkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dosen pamong, seluruh pegawai dan staf Dinas Sosial Kabupaten Jember, serta masyarakat yang telah mendapat manfaat dan mendukung kegiatan ini. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada diri sendiri serta teman-teman dalam kelompok atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan sepanjang proses PPL hingga penyusunan artikel ini. Semoga semua bantuan dan pengalaman yang diberikan bisa menjadi bekal yang berguna bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyani, Ellyvia, & Endah Setyowati. (2025). "Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan Berdasar Prinsip Keadilan Dalam Islam." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11: 168–80.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2025, 17 September). *Profil kemiskinan Maret 2025 Kabupaten Jember*. Berita Resmi Statistik No. 20/09/3509/Th. IX. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- Herlambang, Agus Budi, & Itok Wicaksono. (2025). "Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember." *Jurnal Interelasi* 1(4): 264–75. Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2025, 24 Maret). *Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Juliansyah, David, Antonio Imanda, & Tuti Handayani Is. (2025). "Peran Dinas Sosial dalam Mendistribusikan Perlindungan Sosial pada Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu." *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 12(2): 577–84.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025, 25 Maret). *Program Sembako*.
- Lailiyah, Istianatul, Ria Wulandari, & Muhammad Saiful Anam. (2025). "Peran Dinas Sosial dalam Menangani Kemiskinan di Kabupaten Jember." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1(2015): 683–90.
- Lorenza, Dhina Wanti, Nurul Hak, & Uswatun Hasanah. (2025). "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Konsep Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Umat di Desa Lubuk Unen Kabupaten Bengkulu Tengah" 10(204): 2362–77.
- Nirfalia, Desi. (2022). "Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam."
- Nisak, Khoirun, & Abdul Latib. (2024). "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember"
- Putri dkk. (2023). "Implementasi Bantuan Sosial PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah."
- Rokan, M. K., Batubara, C., & Zulham. (2025). Judicial application of the theory of masalah in Islamic economic cases in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 12(1), 208–226.
- Saidah, S., Bilqis, L., Hisniah, D. W., Hammam, F. A., & Suryanto, A. (2026). Analisis ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia perspektif Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(3), 2720–2740.

- Salsabila, Malikal Balqis, Agus Suharsono, & Abul Haris Suryo Negoro. (2024). "Peran PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gempeng di Kabupaten Jember" 11(1): 55–70.
- Safira, Nadya Nurul, Akramunnas, & Nurfiah Anwar. (2021). "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Percepatan Penanggulangan Keluarga Miskin di Kecamatan Tamalate Kota Makassar." *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 1: 83–91.
- Silviana, Dyan, & Chilmy Nur Wahdatul. (2024). "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mencapai Graduasi Mandiri di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember." *Jurnal Administrasi Publik* 1: 133–43.
- Suprianik, Muhammad Ali Akbar Rafsanjani, Mohammad Ali Wafa, & Nuril Fuad. (2024). "Peran Dinas Sosial dalam Melindungi Masyarakat dari Kemiskinan di Kabupaten Jember." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2(6): 119–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.